

Konferensi Ilmiah Tahunan

GRAND INNA KUTA
18 - 20 September 2014

HEPI 2014

PROSIDING

KONFERENSI ILMIAH TAHUNAN
HIMPUNAN EVALUASI PENDIDIKAN INDONESIA
(HEPI) TAHUN 2014

Asesmen untuk Pendidikan Berkualitas
Assessment for Quality Education



Copyright © HEPI UKD BALI, 2014



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

HEPI

Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia



Universitas Pendidikan Ganesha

**PROSIDING KONFERENSI ILMIAH TAHUNAN
HIMPUNAN EVALUASI PENDIDIKAN INDONESIA (HEPI) TAHUN 2014**

REVIEWER

Bahrul Hayat, Ph.D.

Prof. Dr. Nyoman Dantes

Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A.

Bambang Suryadi, Ph.D

Dr. Nyoman Jampel, M.Pd.

EDITOR

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.

Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.



**Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) UKD Bali
2014**

REVIEWER

Bahrul Hayat, Ph.D.

Prof. Dr. Nyoman Dantes

Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A.

Bambang Suryadi, Ph.D

Dr. Nyoman Jampel, M.Pd.

EDITOR

Dr. I Wayan Surata, M.Pd.

Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.

ISBN 978-602-71325-0-4



e-mail: hepibali@yahoo.com <http://www.hepibali.org>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) karena berkat rachmat dan karuniaNya kita dapat melaporkan hasil kegiatan Konferensi Ilmiah Tahunan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) berupa Prosiding Konferensi Ilmiah Tahun 2014.

Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) sebagai sebuah organisasi profesi yang kita banggakan memang sudah seharusnya memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pendidikan sehingga publikasi sebuah prosiding yang merupakan kumpulan pikiran dan gagasan adalah merupakan keniscayaan.

Terimakasih kepada seluruh kontributor yang telah menginvestasikan sumber dayanya bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan khususnya bidang evaluasi dan pengukuran pendidikan, semoga hasil penelitian dan kajian kita ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Kepada panita penyelenggara dan semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding ini kami berharap selalu berkarya dan memberi sumbangan terbaik untuk kita semua

Denpasar, September 2014

Bahrul Hayat

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa) atas karuniaNya “Prosiding Kongres dan Konferensi Ilmiah Himpunan Evaluasi Pendidikan (HEPI) Tahun 2014” dapat diterbitkan

Prosiding ini merupakan kumpulan makalah ilmiah dari beberapa penulis baik yang merupakan anggota/pengurus Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia Pusat dan Unit Koordinasi Daerah (UKD) Propinsi seluruh Indonesia maupun dari akademisi, pendidik, peneliti, dan pemerhati evaluasi pendidikan.

Prosiding ini juga merupakan kumpulan bukti dan karya dari tokoh-tokoh dan ahli evaluasi pendidikan dalam kerangka mengawal mutu pendidikan dan pembangunan pendidikan Indonesia sebagai bagian tanggungjawab akademis dan sumbangsih ide, pikiran dan gagasan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya sebuah prosiding sebagai bunga rampai publikasi hasil penelitian, kajian ilmiah, dan harapan. Semoga dapat menjadi referensi, pedoman dan panduan untuk mengembangkan karya tulis yang relevan, terutama dalam bidang penelitian, evaluasi, pengukuran, dan asesmen.

Denpasar, September 2014

A.A.I.N. Marhaeni

DAFTAR ISI

Penskoran dan Kelayakan Butir Skala, Penilaian Berskala Ordinal <i>Prof. Dr. Baso Intang Sappaile</i>	1
Uji Validitas Konstruk pada Instrumen Ryff's Psychological Well-Being 42 Version dengan Metode Confirmatory Factor Analysis (CFA) <i>Dr. Bambang Suryadi dan Setika Jati Aminrais</i>	8
Penskalaan Instrumen Tipe Thursone Dan Likert Dengan Pendekatan Teori Modern atau IRT <i>Prof. Dr. Djamari Mardapi, Ph.D</i>	17
Pengembangan Instrumen Penilaian Proyek pada Pembelajaran IPA Fisika SMP <i>Dr. Aswin Hermanus Mondolang, M.Pd</i>	27
Profil Kompetensi Asesmen Pembelajaran Mahasiswa PPL-KKN FT-UNY di Smk Teknologi dan Rekayasa <i>Prof. Dr. Sudji Munadi, M.Pd</i>	38
Pembangkitan Kunci Jawaban (<i>Key</i>) pada <i>Computerized Adaptive Testing</i> <i>Dr. Rukli, M.Pd, MCS</i>	49
Instrumen Asesmen Hasil Belajar Fisika di SMAN se-Kota Tondano <i>Prof. Dr. Cosmas Poluakan</i>	58
Evaluasi Literasi Media Guru Sekolah Dasar Tersertifikasi di Lampung Selatan, Provinsi Lampung <i>Dr. Herpratiwi</i>	67
Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Matematika SMP Negeri Kelas VII di Kabupaten Sleman <i>Prof. Dr. Badrun Kartowagiran</i>	79
Dari Skor 4,25 Menjadi Skor 10 (Perjuangan Memperoleh Skor Sempurna dalam UASBN Mata Pelajaran Matematika SD) <i>Dr. Heri Retnawati</i>	88
Pengembangan Model Pelatihan Apresiasi Senitari Daerah Setempat pada Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang <i>Dr. Wahyu Lestari</i>	95
Evaluasi Implementasi PKP Pada Pembelajaran Biologi di SMAN: Pendekatan Mixed-Method <i>Dra. Wiwi Isnaeni, M.S</i>	104
Pengembangan Instrumen Supervisi Pembelajaran <i>Scientific Approach</i> pada Guru Bahasa Inggris di Sekolah Menengah <i>Prof. Dr. Fachruddin</i>	112
Evaluasi Terhadap Implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Evaluasi Diri Sekolah di SD Kabupaten Badung <i>Dr. Ir. I Ketut Suarnaya</i>	120
Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Berbasis Pendekatan Saintifik Menggunakan Discrepancy Model <i>Dr. I Wayan Surata</i>	130
Penggunaan <i>Item Respons Theory</i> (IRT) Pada Analisis Tes Hasil Belajar <i>Dr. Nonoh Siti Aminah</i>	141

Membandingkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dan Literasi Sains Pada Soal IPA UN, TIMSS, dan PISA <i>Dr. Wasis</i>	150
Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Kota Malang <i>Dr. Yuni Pantiwati</i>	158
Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Fakultas Ilmu Sosial UNY <i>Dr. Aman</i>	168
Ujian Nasional pada Kurikulum 2013, Permasalahan, dan Alternatif Solusinya untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia <i>Dr. Hari Setiadi</i>	175
Penerapan <i>Partial Credit Model</i> pada Tes Pilihan Ganda Termodifikasi Merupakan Model Alternatif Asesmen Fisika yang Adil <i>Dr. Edi Estiyono, M.Si.</i>	184
Analisis Integrasi <i>Soft Skills</i> Sebagai Pembentuk Karakter dalam Pembelajaran Busana (Penilaian Proses Belajar Praktik di SMK) <i>Dr. Sri Wening</i>	192
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Busana FT UNY Melalui Model AFL Berbasis HOTS <i>Dr. Widhiastuti</i>	200
Kurikulum 2013 dan Pembentukan Karakter Peserta Didik (Pengalaman Empirik di Labschool FITK UIN (Jakarta) <i>Dr. Ahmad Sofyan</i>	204
Evaluasi Implementasi Lesson Study dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Dosen di FKIP Universitas PGRI Yogyakarta <i>Dr. Sri Rejeki</i>	209
Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Kimia Konseptual Bergambar dengan Pembelajaran Langsung (Penelitian Pada Siswa Kelas XII SMA Katolik Karitas Tomohon) <i>Dr. Hetty Hortentie Langkudi</i>	212
Membangun Pendidikan Berkualitas Melalui Penerapan <i>Alternative Assesment</i> dalam Pembelajaran <i>Dr. Lilik Sabdaningtyas</i>	219
Pengembangan Teknik Delphi dalam Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Sekolah Menengah Atas se-Kota Tomohon <i>Dr. E. S. N. Kaunang</i>	222
Klasifikasi Baru Inteligensi dengan Tes IST untuk Meningkatkan Keakuratan dalam Mendiagnosa Kecerdasan <i>Dr. Fitri Andriani</i>	227
Pengaruh Penggunaan Pendekatan Pembelajaran dan Penilaian Berbasis Kelas terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Setelah Mengontrol Kemampuan Awal Matematika Siswa (Eksperimen pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri di Kota Manado) <i>Dr. Roby J. Wenas</i>	232
Implementasi Asesmen Portofolio pada Akreditasi Sekolah Dasar <i>Dr. Rochmiyati</i>	238

Kesiapan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SD/MI oleh Guru SD di Provinsi Lampung Tahun 2014 <i>Prof. Dr. Ngadimun Hd</i>	242
Implementasi Penilaian Autentik oleh Guru SMP yang Tergabung dalam MGMP IPS di Kota Bandar Lampung <i>Prof. Dr. Edy Purnomo</i>	246
Pengaruh Penerapan Penilaian Kinerja, Penilaian Portofolio dan Penilaian Tertulis Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Fisika Dasar II <i>Dr. Fredy Dungus</i>	251
Evaluasi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Guru Kelas/Mapel di SMP se Kabupaten Toraja Utara <i>Prof. Dr. Jokebet Saludung</i>	257
Intensi Berwirausaha pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan <i>Dr. Miftahuddin</i>	262
Evaluasi Program Supervisi Manajerial Pengawas SMA di Kabupaten Baru Rovinsi Sulawesi Selatan <i>Prof. Dr. Muh. Sidin Ali</i>	268
Asesmen Otentik Melalui Latihan Terbimbing pada Materi Mekanika Teknik <i>Dr. Nanik Estidarsini</i>	271
Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Kepuasan Mahasiswa Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan PPS UNM <i>Prof. Dr. Ruslan</i>	276
Pengaruh Pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> (PBL) terhadap Peningkatan Kemampuan Mahasiswa pada Matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia <i>Prof. Dr. Suandi Sidauruk</i>	283
Pengembangan Model Instrumen Penilaian Karakter pada Pembelajaran Sains Terpadu di Sekolah Menengah Pertama <i>Dr. Undang Rosidin</i>	287
<i>The Comparison Between Multiple Choice Test Form and The Scoring Methods Towards Chemistry Reliability Test</i> <i>Dr. Yuliatr Sastra Wijaya</i>	295
Model Instrumen Kinerja Kepala Sekolah Berbasis Supervisi Akademik dalam Pembinaan Profesional Guru <i>Dr. Syamsul Bahar</i>	300
Level Kompetensi Ujian Nasional 2014: Deskripsi Kompetensi Siswa Berdasarkan Data Empirik <i>Dr. Rahmawati,S.T, M.Ed.</i>	305
Penerapan Instrumen Penilaian Seni Lukis Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta <i>Prof. Dr. Tri Hartiti Retnowati</i>	310
Model Penilaian Formatif dan Gaya Berpikir dalam Pembelajaran Sejarah <i>Dr. Patahuddin</i>	
Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Keterampilan Proses Sains <i>dr. Nina kadaritna</i>	320
Pembelajaran Tematik-Integratif Untuk Membentuk Generasi Penerus Bangsa Yang Berkarakter dan Berakhlak Mulia <i>Dr. Abd.Rahman A. Ghani</i>	325

Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Praktikum <i>Engine</i> Otomotif Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif <i>Prof.Dr. Gaguk Margono</i>	330
Komparasi Estimasi Rerata Skor Responden antara <i>Item Sampling</i> , <i>Examinee Sampling</i> , dan <i>Multiple Matrix Sampling</i> <i>Prof.Dr. Burhanuddin Tola</i>	335
Komparasi Estimasi Koefisien Reliabilitas Multidimensi pada Pengukuran Afeksi terhadap Matematika Siswa SMA <i>Dr. Wardani Rahayu</i>	340
Evaluasi Program Penyelenggaraan SMAN CMBBS Sebagai Sekolah Unggulan Provinsi Banten <i>Dr. Komaruddin Sahid</i>	345
Pengukuran Pelayanan Akademik, Motivasi Belajar dan Hubungannya dengan Hasil Belajar Fisika Terapan Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar <i>Dr. Kaharudin Arafah</i>	350
Instrumen Penilaian Praktik Mengajar Mahasiswa Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka <i>Prof. Dr. Yetty Supriyati</i>	355
Pembelajaran Terintegrasi Pengembangan Sikap dan Penilaiannya Dalam Implementasi Kurikulum 2013 <i>Gede Sudirta</i>	360
Uji Validitas Butir Instrumen Kecerdasan Logis-Matematis <i>Dr. Komang Setemen, MT</i>	365
Asesmen Diri pada Penilaian Autentik: Suatu Cara Pendidikan Autonomi <i>Prof. Dr. A.A.I.N. Marhaeni, M.A</i>	375
Model Evaluasi Pendidikan Karakter yang Komprehensif <i>Prof. Dr. i Made Candiasa, M.I.Kom</i>	375
Model Evaluasi Pendidikan Karakter yang Komprehensif <i>Prof. Dr. i Made Candiasa, M.I.Kom</i>	380
<i>Evaluating The Program Of Information Center And Adolescent's Reproductive Health Counseling.</i> <i>Prof. Dr. Awaluddin Tjalla</i>	385
<i>Evaluating The Program Of Information Center And Adolescent's Reproductive Health Counseling.</i> <i>Prof. Dr. Awaluddin Tjalla</i>	390
Model Penilaian Diri Berbasis Graphic Organiser Pada Pembelajaran Matematika di SMP. Mansyur Dan Hamda.....	395
Model Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dr. Desa Putu Parmini, M.S.....	400
Determinasi Pola Asuh Orang Tua Peer Group Dan Interaksi Remaja Dengan Wisatawan Terhadap Perilaku Agresif Ditinjau Dari Klasifikasi Daerah Wisata Di Kalangan Remaja Di Provinsi Bali Dr. I Wayan Susanta.....	405

UJIAN NASIONAL PADA KURIKULUM 2013, PERMASALAHAN, DAN ALTERNATIF SOLUSINYA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA Oleh: Hari Setiadi Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA (UHAMKA) (UKD HEPI JABODETABEK)

Abstrak Dalam Kurikulum 2013 penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus komprehensif, guru harus seimbang dalam menilai pengetahuan, ketrampilan dan sikap (*evaluasi internal*). Apapun kurikulumnya, termasuk dalam implementasi Kurikulum 2013, Ujian Nasional masih tetap diperlukan, tentu saja materi (*content*) harus disesuaikan dengan Kurikulum 2013. Karena untuk keperluan evaluasi, baik evaluasi internal (*classroom assessment*) maupun *evaluasi external* (Ujian Nasional), kedua evaluasi tersebut sangat diperlukan, tidak bisa satu menggantikan yang lain, karena fungsi kedua evaluasi tersebut juga berbeda. Walaupun dalam pelaksanaan Ujian Nasional masih terdapat beberapa permasalahan, bukan berarti Ujian Nasionalnya yang harus dihilangkan atau ditiadakan, tetapi pelaksanaan teknis Ujian Nasionalnya yang masih harus terus perlu disempurnakan. Beberapa masalah pokok dalam pelaksanaan Ujian Nasional setiap tahunnya disebabkan karena menggunakan ***paper and pencil test***, karena itu untuk Ujian Nasional tahun 2015 secara bertahap sudah harus bisa menggunakan ***Computerized Based Testing (CBT)***. Diasumsikan bahwa perbendaharaan Bank Soal sudah lebih banyak dan juga persiapan infrastrukturnya diasumsikan sudah lebih siap sehingga di masa mendatang pelaksanaan Ujian Nasional di beberapa tempat di Indonesia juga sudah bisa menggunakan ***Computerized Adaptive Test (CAT)***. Selain itu di masa mendatang, pelaksanaan Ujian Nasional seharusnya dilaksanakan oleh institusi yang profesional dan independen, dan mempunyai cabang di seluruh propinsi di Indonesia, sehingga pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional sampai dengan di tingkat terakhir di ruang-ruang ujian yang jumlah ruang ujiannya banyak, juga bisa diawasi oleh petugas yang diberi tugas oleh institusi tersebut, bukan seperti Ujian Nasional sekarang, pengawasan di ruang ujian diawasi oleh pihak internal sendiri, yaitu guru-guru di sekolah. Sehingga pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional di ruang ujian oleh pihak internal, walaupun diawasi oleh guru yang tidak mengajar di sekolahnya tapi masih berada dalam satu wilayahnya, apalagi dengan system Otonomi Daerah, bisa saja akan menimbulkan permasalahan ***conflict of interest***. Kata-kata kunci (*key words*): Evaluasi internal, evaluasi external, *paper and pencil test*, *Computerized Based Testing (CBT)*, *Computerized Adaptive Test (CAT)*, institusi yang profesional dan independen, *conflict of interest* 95

1. LATAR BELAKANG UJIAN NASIONAL (UN)

Setiap tahun apabila akan dilaksanakan Ujian Nasional (UN), selalu ada saja pihak-pihak yang menentang dan yang mendukung UN. Pada saat ini walaupun sudah diadakan Konvensi Ujian Nasional masih saja ada pihak yang pro dan kontra terhadap Ujian Nasional (UN). Pemerintah masih tetap melaksanakan Ujian Nasional, hal ini disebabkan menurut pemikiran pemerintah belum ada alat atau instrumen yang dapat menggantikan fungsi-fungsi yang esensial dari Ujian Nasional yang terutama adalah sebagai standar minimum nasional yaitu alat untuk mengetahui kualitas atau mutu pendidikan seluruh sekolah-sekolah yang berada di Indonesia, apakah sekolah-sekolah tersebut sudah mencapai standar minimum nasional yang diinginkan. Sehingga bisa diketahui apabila ada sekolah-sekolah yang kualitasnya kurang akan bisa dibantu dan dibina, dan diharapkan juga secara bertahap disparitas atau kesenjangan mutu seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bisa akan semakin kecil. Selain itu apabila pemerintah tidak melaksanakan Ujian Nasional, maka pemerintah akan menyalahi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 58 ayat 2 yang berbunyi "Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan". Walaupun memang di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat 1, juga disebutkan bahwa Evaluasi Hasil Belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dan memang benar menurut Undang-undang kita tersebut yang lebih tahu mengenai peserta didik adalah para pendidik atau gurunya sendiri, tetapi kita harus baca juga Undang-undang itu pasal 58 ayat 2 bahwa kita juga harus melakukan evaluasi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Sebelum itu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 57 ayat 1, juga dijelaskan bahwa: "Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan". Kemudian selanjutnya dijelaskan pada Undang-undang tersebut, pada pasal 59 ayat 3 bahwa: "Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah" 96

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 66 disebutkan bahwa “Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional”. Jadi jelas menurut Undang-undang kita bahwa yang melaksanakan evaluasi di negara kita ini bukan hanya oleh para pendidik atau guru saja, tetapi juga oleh lembaga mandiri atau bukan guru atau bukan sekolah saja. Tapi juga untuk evaluasi yang fungsinya untuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional, agar hasil evaluasinya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat maka evaluasinya harus dilakukan oleh lembaga mandiri. Dijabarkan dan ditekankan lagi di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 1 yang juga sudah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 berbunyi bahwa: “Evaluasi dilakukan oleh Pendidik, evaluasi dilakukan oleh sekolah, dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah”. Jadi lebih jelas lagi ditegaskan pada peraturan tersebut bahwa evaluasi dilakukan secara komprehensif, dilakukan oleh pihak internal, yaitu oleh pendidik dan oleh sekolah, dan juga oleh pihak external, yaitu pemerintah. Saat ini Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan Evaluasi Pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, pemerintah harus melaksanakan ke dua jenis evaluasi tersebut, yaitu evaluasi internal dan juga evaluasi external. Apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melaksanakan Ujian Nasional (UN), berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalahi Undang-undang. Apapun kurikulumnya termasuk kurikulum 2013, Ujian Nasional harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah.

2. EVALUASI INTERNAL

Evaluasi internal dalam Proses Belajar Mengajar biasa disebut juga dengan nama Penilaian di Kelas atau *Classroom Assessment*. Evaluasi internal ini dilakukan hanya oleh guru-guru dalam Proses Belajar Mengajar setiap harinya di kelas. Tujuan utama dari penilaian internal ini adalah untuk menelusuri atau mengecek apakah materi dan kompetensi yang sudah diajarkan oleh guru di kelas sudah dikuasai oleh para siswa. Jadi sifatnya lebih kepada membantu para siswa dalam menguasai materi dan kompetensi yang sudah diajarkan guru di kelas, dan sifat dari penilaian di kelas tersebut adalah *authentic assessment*. 97

Prinsip-prinsip pokok dari *authentic assessment* adalah (1) proses penilaiannya tidak boleh terpisahkan dari Proses Belajar Mengajar, artinya penilaiannya tersebut harus dilakukan dalam Proses Belajar Mengajar di kelas apabila siswa melakukan praktek di laboratorium maka penilaiannya harus juga di laboratorium tidak boleh di tempat lain atau hasil penilaiannya dapat digunakan untuk memperbaiki Proses Belajar Mengajar, dan apabila dalam Proses Belajar Mengajar tersebut guru-guru di kelas menggunakan Kurikulum 2013, maka penilaian atau evaluasinya juga harus berdasarkan Kurikulum 2013, (2) penilaiannya harus mencerminkan masalah dunia nyata, tidak boleh masalah yang bukan dari dunia nyata, jadi masalah yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari; (3) penilaiannya menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik yang diukur, artinya tidak hanya menggunakan satu metode penilaian saja, misal kalau karakteristik yang diukur tentang kompetensi siswa menggunakan sesuatu alat, maka metode penilaiannya tidak hanya dengan *paper and pencil test* saja tetapi harus juga dengan menggunakan metode penilaian *performance assessment*; (4) penilaian harus bersifat holistic artinya penilaiannya harus bersifat menyeluruh (*comprehensive*).

3. EVALUASI EXTERNAL: UJIAN NASIONAL

Setelah kita membahas evaluasi internal, dapat kita simpulkan bahwa ada keterkaitan fungsi evaluasi internal dengan evaluasi external, yaitu: fungsi dari evaluasi internal sebagai perbaikan dan peningkatan prestasi siswa sehari-hari dalam Proses Belajar Mengajar secara komprehensif oleh guru di kelas dan juga untuk persiapan menghadapi external evaluasi. Apabila sekolah sudah melakukan fungsi evaluasi internal dengan baik, karena di dalam kurikulum 2013 penilaian sehari-hari di kelas harus dilaksanakan secara komprehensif, maka siapapun dan bagaimanapun evaluasi external yang hanya menilai kompetensi knowledge saja, sekolah juga pasti akan sudah siap menghadapinya. Jadi fungsi utama evaluasi external adalah pertanggung jawaban (*accountability*) kepada masyarakat dan juga legitimasi yang tidak sesuai kalau evaluasi external itu dilakukannya oleh pihak internal. Dalam Ujian Nasional kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional juga sudah memasukkan nilai sekolah (*internal evaluation*). Nilai Akhir (NA) adalah 60% Nilai Ujian Nasional + 40% Nilai Sekolah/Madrasah; peserta didik dinyatakan lulus Ujian Nasional jika Nilai rata-rata paling rendah 5,5 dan nilai tiap mata pelajaran paling rendah 4,0.

Dari data yang kita peroleh perbandingan nilai Ujian Nasional, Nilai Sekolah, dan Nilai Akhir untuk nilai Ujian Nasional jenjang 98

SMA/ sederajat dua tahun terakhir ini, yaitu tahun pelajaran 2012/2013 dan tahun pelajaran 2013/2014 adalah sebagai berikut: **Gambar 1. Distribusi Nilai SMA/ Sederajat tahun 2013/2014** Dari gambar 1 di atas terlihat bahwa Nilai Sekolah (evaluasi internal) standar deviasinya sangat kecil dibandingkan standar deviasi Nilai Ujian Nasional (evaluasi external). Ini berarti secara nasional, Nilai Sekolah nilai-nilainya mengumpul semua ke sebelah kanan ke rata-rata nasionalnya 8,39. Artinya juga bahwa Nilai Sekolah secara nasional banyak mengumpul di 8,39 disekitar 5,3 dan 9,9. Sebaliknya untuk Nilai Ujian Nasional, nilai-nilainya menyebar dari nilai 1,08 sampai nilai 9,7, sedangkan rata-rata Nilai Ujian Nasionalnya hanya 6,12. Jadi untuk Nilai Ujian Nasional banyak mengumpul ke sebelah kiri, banyaknya di 6,12 sekitar 1,08 dan 9,7. Sehingga Nilai Akhirnya gabungan tengah-tengah antara Nilai Sekolah dengan Nilai Ujian Nasional.

02468 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 02468 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Distribusi Nilai SMA/ Sederajat Tahun 2013/2014 Mean : 7,02 Std : 0,87 Max: 9,6 Min: 1,7 Mean : 6,12 Std : 1,39 Max: 9,7 Min: 1,08 Mean : 8,39 Std : 0,42 Max: 9,9 Min: 5,3 Nilai Akhir Nilai UN Nilai Sekolah Standar Deviasi besar menunjukkan sebaran nilai yang lebar 02468 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Standar Deviasi kecil menunjukkan sebaran sempit atau nilai yang mengumpul 7,02 8,39 6,12 99

Gambar 2. Distribusi Nilai SMA/MA Tahun 2012/2013 Dari Gambar 2 terlihat bahwa pola distribusi Nilai SMA/MA tahun pelajaran 2012/2013 juga serupa dengan pola distribusi tahun sekarang. Terlihat bahwa distribusi variasi Nilai Sekolah juga sangat kecil mengumpul di 8,40, sedangkan distribusi variasi Nilai Ujian Nasional sangat menyebar dan mengumpul di 6,35. Secara nasional juga bahwa hampir semua sekolah-sekolah di Indonesia memberikan Nilai Sekolahnya tinggi-tinggi hampir mendekati angka 10, sebaliknya dari hasil Ujian Nasionalnya diperoleh Nilai Ujian Nasionalnya sangat menyebar dan rata-rata nilai Ujian Nasionalnya sekolah-sekolah itu rata-rata semuanya di bawah rata-rata Nilai Sekolahnya. Hanya sedikit sekali sekolah-sekolah yang Nilai Ujian Nasionalnya lebih tinggi daripada Nilai Sekolahnya dan mereka juga sudah melaksanakan evaluasi internal secara baik sehingga peserta didiknya sudah siap menghadapi Ujian Nasional (evaluasi external). Distribusi Nilai SMA/MA (N+S) Tahun 2012/2013 6,35 8,40 7,17 19 7,17 8,40 6,35 100

Gambar 3. Ringkasan Hasil Akhir UN SMA/MA dan SMK Tahun 2013/2014 Pada Gambar 3 di atas terlihat dengan bobot evaluasi external (60%) dan evaluasi internal (40%), tingkat kelulusan peserta didik SMA/MA dan SMK sudah sangat tinggi. Pada tahun 2013/2014 tingkat kelulusan peserta didik SMA/MA adalah 99,52% dan tingkat kelulusan peserta didik SMK adalah 99,90%. Demikian pula pada tahun pelajaran 2012/2013 tingkat kelulusan peserta didik SMA/MA adalah 99,53%, dan tingkat kelulusan peserta didik SMK adalah 99,94%. Jadi sebenarnya dengan komposisi bobot evaluasi evaluasi external atau Ujian Nasional 60% dan evaluasi internal atau Nilai Sekolah 40%, dan dengan pengalaman data-data yang ada selama ini, peserta didik tidak perlu lagi khawatir kalau kalau mereka tidak bisa lulus Ujian Nasional. Lulus ? 1.624.946 (99,52%) 7.811 (0,48%) 1.632.757 Ringkasan Hasil Akhir UN - SMA/MA Tahun 2013/2014 tidak ya 20 Kelulusan 2012/2013 = 99.94% Peserta UN Lulus ? 1.170.748 (99,90%) 1.159 (0,10%) 1.171.907 Ringkasan Hasil Akhir UN - SMK Tahun 2013/2014 tidak ya Peserta UN Kelulusan 2012/2013 = 99.53%

Untuk ke depannya ada usulan untuk mengubah bobot komposisi Nilai Sekolah lebih besar bobotnya dari Nilai Ujian Nasional. Hal ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa dalam **Kurikulum 2013** guru-guru kita sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan evaluasi internal yang komprehensif (kognitif, psikomotor, afektif) , sehingga hasilnya juga dapat lebih dipercaya, dan ke depannya Ujian Nasional masih tetap 101

diperlukan karena belum ada yang bisa menggantikan fungsinya, tetapi mungkin komposisi bobot untuk kelulusannya juga bisa semakin kecil Kemudian seperti juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 68, disebutkan juga bahwa “Hasil Ujian digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu pendidikan; (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Ujian Nasional sebagai Peta Mutu Pendidikan dan Pembinaan Pemberian

Bantuan Untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia diperlukan satu alat ukur yang sama. Apabila tidak ada Ujian Nasional dimana sekolah-sekolah di Indonesia hanya melakukan Ujian Sekolah di sekolahnya masing-masing, maka kita tidak bisa memetakan mutu pendidikan sekolah-sekolah tersebut, karena mereka menggunakan Ujian Sekolah yang berbeda-beda. Dari hasil pemetaan ini, diharapkan nantinya mutu pendidikan sekolah-sekolah di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terutama sekolah-sekolah yang masih rendah kualitasnya bisa diperbaiki sehinggadiharapkan kesenjangan mutunya relatif juga tidak terlalu berbeda. Artinya untuk membandingkan mutu pendidikan atau kualitas lulusan sekolah-sekolah yang ada di dalam wilayah NKRI diperlukan satu alat ukur, yang sekarang kita namakan “Ujian Nasional (UN)”. Karena dengan adanya Ujian Nasional semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke bisa dapat diketahui mutu pendidikannya, sehingga para pengambil kebijakan baik di tingkat sekolah, daerah maupun pusat dapat memperbaiki mutu sekolahnya berdasarkan data empirik yang langsung dari lapangan. Kita dapat melihat secara nasional Indeks Kompetensi Sekolah misal sebagai contoh kita ambil Indeks Kompetensi Sekolah SMA jurusan IPA dan jurusan IPS. 102

Gambar 4. Dari Gambar 4. Diatas data hasil Ujian Nasional tahun 2013 ternyata Indeks Kompetensi Sekolah secara nasional terkait dengan kemampuan siswa untuk menyerap mata pelajaran pada jenjang SMA jurusan IPA sebesar 64,21%, sedangkan daya serapnya untuk SMA jurusan IPS lebih kecil yaitu sebesar 60,58% . Untuk variasi atau standard deviasi indeks kompetisi jurusan IPA dan jurusan IPS secara nasional perbedaannya tidak terlalu signifikan yaitu 10,85 untuk IPA dan 10,31 untuk IPS. Indeks Kompetensi Sekolah (1.....100) 11 Jurusan IPA Jurusan IPS 103

Gambar 5. Dari Gambar 5. Kita juga dapat lihat Indeks Kompetensi per Mapel per jurusan secara nasional. Jadi untuk tahun 2013 mata pelajaran matematika di IPA yang paling rendah dibanding mata pelajaran lainnya. Sedangkan di IPS matapelajaran Ekonomi yang paling rendah dibanding dengan matapelajaran lainnya. Selain bisa dilihat Indeks Kompetensi per Mata Pelajaran di jurusan IPA dan IPS secara nasional, bisa juga dilihat peta Indeks Kompetensi Sekolah menurut jurusan dan Provinsi. 68.41 71.50 56.96 59.15 64.93 63.88 62.68 68.06 59.82 54.69 61.66 57.01 Indeks Mapel. Bhs. Indonesia Indeks Mapel. Bhs. Inggris Indeks Mapel. Matematika Indeks Mapel. Fisika Indeks Mapel. Kimia Indeks Mapel. Biologi Indeks Mapel. Bhs. Indonesia Indeks Mapel. Bhs. Inggris Indeks Mapel. Matematika Indeks Mapel. Ekonomi Indeks Mapel. Sosiologi Indeks Mapel. Geografi 12 Capaian Indeks Kompetensi Mapel Jurusan IPA Capaian Indeks Kompetensi Mapel Jurusan IPS Secara Nasional, pada jurusan IPA Indeks Kompetensi mapel yang paling rendah adalah pada mapel matematik (56,96), sedangkan untuk indeks kompetensi mapel paling tinggi pada mapel Bhs. Inggris (71,50) Secara Nasional, pada jurusan IPS Indeks Kompetensi mapel yang paling rendah adalah pada mapel Ekonomi (54,69), sedangkan untuk indeks kompetensi mapel paling tinggi pada mapel Bhs. Inggris (68,06) 68.41 71.50 56.96 59.15 64.93 63.88 Bhs. Indo Bhs. Ingg Mat Fisika Kimia Biologi Maximum Nasional 62.68 68.06 59.82 54.69 61.66 57.01 Bhs. Indo Bhs. Ingg Mat Ekono mi Sosiolo gi Geogra fi Maximum Nasional Indeks Kompetensi Mapel Menurut Jurusan 104

Gambar 6. Dari Gambar 6. Terlihat bahwa untuk jurusan IPA rata-rata indeks kompetensi yang paling tinggi adalah di Propinsi Jatim dan rata-rata indeks kompetensi yang paling rendah adalah di Propinsi Malut. Sedangkan untuk jurusan IPS rata-rata indeks kompetensi yang paling tinggi adalah propinsi Jatim, dan rata-rata indeks kompetensi yang paling rendah adalah di Propinsi Malut.

69.77 66.60 65.29 65.04 64.11 60.80 60.77 60.57 60.24 59.99 58.37
58.30 57.89 57.57 56.85 56.80 56.34 56.10 56.00 55.53 55.16 54.63 54.49 54.34 53.19 51.98 51.53
51.02 49.60 49.59 48.82 47.85 46.28 Prov. Jatim Prov. Sumut Prov. DKI Prov. Jateng Prov. Jabar
Prov. Kalbar Prov. NTB Prov. Bali Prov. DIY Prov. Jabar Prov. Riau Prov. Kepri Prov. Jambi Prov.
Sumsel Prov. Sumbar Prov. Kalteng Prov. Banten Prov. Aceh Prov. Lampung Prov. Sulbar Prov.
Kaltim Prov. Maluku Prov. Kalsel Prov. Sultra Prov. Babel Prov. Sulut Prov. Papua Prov. Bengkulu
Prov. NTT Prov. Sulsel Prov. Gorontalo Prov. Sulteng Prov. Malut 76.90 70.53 69.05 68.73 68.16
66.24 64.36 64.14 63.65 63.44 63.22 62.84 62.58 61.98 61.06 60.88 60.71 60.16 59.29 59.18 59.16
58.64 58.05 57.06 56.70 56.18 54.93 54.33 53.75 53.69 53.01 52.29 47.73 Prov. Jatim Prov. DKI
Prov. Bali Prov. Sumut Prov. Jateng Prov. Jabar Prov. Kalbar Prov. Riau Prov. Aceh Prov. Jambi
Prov. Jabar Prov. DIY Prov. Kepri Prov. Sumsel Prov. Kalteng Prov. Sumbar Prov. NTB Prov.
Banten Prov. Sultra Prov. Kaltim Prov. Lampung Prov. Sulbar Prov. Kalsel Prov. Babel Prov.
Maluku Prov. Sulut Prov. Papua Prov. Sulsel Prov. NTT Prov. Bengkulu Prov. Gorontalo Prov.
Sulteng Prov. Malut 16 Capaian Indeks Kompetensi Sekolah Jurusan IPA Indeks Kompetensi
Sekolah Menurut Jurusan dan Provinsi Indeks Nasional 60,58 Rerata 33 Provinsi 56,71 Indeks
Nasional 64,21 Rerata 33 Provinsi 60,69 Capaian Indeks Kompetensi Sekolah Jurusan IPS 105

Gambar 7. Dari Gambar 7. kita dapat memetakan bahwa dari propinsi Jatim ini bisa dilihat bahwa di dalam propinsi Jatim itu sendiri kabupaten/kota mana yang paling tinggi dan paling rendah rata-rata indeks kompetisinya. Jadi terlihat bahwa kabupaten Lamongan adalah kabupaten/kota yang paling tinggi rata-rata indeks kompetisinya di Jatim, sedangkan Kota Batu adalah kota yang paling rendah rata-rata indeks kompetisinya di Jatim. Artinya kalau di Jawa Timur, kabupaten/kota yang masih perlu mendapat perhatian atau bantuan adalah Kota Batu, walaupun propinsi Jawa-Timur nya adalah propinsi yang paling terbaik di Indonesia.

76.90 70.53 69.05 68.73 68.16 66.24 64.36 64.14 63.65 63.44 63.22 62.84 62.58
61.98 61.06 60.88 60.71 60.16 59.29 59.18 59.16 58.64 58.05 57.06 56.70 56.18 54.93 54.33 53.75
53.69 53.01 52.29 47.73 Prov. Jatim Prov. DKI Prov. Bali Prov. Sumut Prov. Jateng Prov. Jabar
Prov. Kalbar Prov. Riau Prov. Aceh Prov. Jambi Prov. Jabar Prov. DIY Prov. Kepri Prov. Sumsel
Prov. Kalteng Prov. Sumbar Prov. NTB Prov. Banten Prov. Sultra Prov. Kaltim Prov. Lampung
Prov. Sulbar Prov. Kalsel Prov. Babel Prov. Maluku Prov. Sulut Prov. Papua Prov. Sulsel Prov. NTT
Prov. Bengkulu Prov. Gorontalo Prov. Sulteng Prov. Maluku 84.15 83.58 82.65 82.64 80.85 80.73
80.28 80.10 79.21 78.97 78.35 78.13 77.83 77.43 77.23 76.89 76.58 76.57 76.45 76.40 76.05 75.99
75.99 75.94 74.90 74.28 74.09 73.96 73.63 73.48 73.36 71.97 71.96 71.16 70.69 68.40 66.39 63.47
Kab. Lamongan Kota Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kab. Bojonegoro Kab. Tuban Kab.
Ponorogo Kab. Mojokerto Kab. Madiun Kota Surabaya Kota Madiun Kota Mojokerto Kota
Probolinggo Kota Blitar Kab. Sumenep Kab. Jombang Kab. Blitar Kota Kediri Kab. Nganjuk Kab.
Lumajang Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Magetan Kab.
Tulungagung Kab. Ngawi Kab. Situbondo Kab. Sampang Kab. Jember Kab. Trenggalek Kab.
Pasuruan Kota Malang Kab. Bondowoso Kab. Kediri Kab. Probolinggo Kab. Malang Kota Batu
Indeks Nasional 64,21 Rerata 33 Provinsi 60,69 Indeks Prov. Jatim 76,90 Rerata 38 Kab-Kota 76,07
Indeks Kompetensi Sekolah Jurusan IPA, Prov. Jatim Capaian Indeks Kompetensi Sekolah Jurusan
IPA Capaian Indeks Kompetensi Sekolah, Prov. Jatim Jurusan IPA 29

5. Ujian Nasional sebagai dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya dan penentu kelulusan.

Selain digunakan untuk pemetaan dan pemberian bantuan bagi sekolah-sekolah yang kurang rata-rata indeks kompetisinya, Ujian Nasional di beberapa tempat juga sudah digunakan untuk dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya saja di DKI Jakarta, nilai Ujian Nasional SMP secara murni, objektif dan transparan dengan computer dan internet sudah digunakan sebagai dasar seleksi masuk ke jenjang SMA. Demikian pula nilai Ujian Nasional SMA digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk ke Perguruan Tinggi dan Taruna Akabri. 106

Dengan adanya Ujian Nasional siswa-siswa di seluruh tanah air di Indonesia bisa saja ikut seleksi untuk masuk di semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, misal siswa-siswa di Sulawesi dengan menggunakan nilai Ujian Nasional bisa saja ikut seleksi masuk SMA di pulau-pulau lain di Indonesia, sehingga keeratan NKRI bisa lebih terjaga. Ujian Nasional sejak tahun 2004 juga sudah digunakan sebagai penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan. Ada pendapat hasil Ujian Nasional jangan digunakan sebagai penentu kelulusan, tapi hasil Ujian Nasional hanya digunakan sebagai pemetaan mutu pendidikan nasional saja. Tapi harus juga kita pikirkan apabila Ujian Nasional yang biayanya juga tidak kecil, apabila hanya digunakan sebagai alat pemetaan mutu pendidikan saja tidak untuk menentukan kelulusan siswa, kemungkinan besar siswa dalam mengerjakan soal-soalnya juga tidak terlalu serius, mungkin juga mereka tidak belajar serius sebelumnya, karena hasilnya tidak mempengaruhi prestasi mereka. Akhirnya hasil dari hasil Ujian Nasional itupun nantinya akan tidak berarti karena dikerjakan dengan tidak serius. Jadi kenyataannya, karena Ujian Nasional dipakai sebagai penentu kelulusan, semua pihak jadi termotivasi untuk bekerja, seperti guru-guru dengan giat mengajar siswa-siswanya lebih aktif demikian pula siswa-siswanya lebih giat belajar untuk dapat nilai agar lulus Ujian Nasional. Sebelum tidak ada peraturan batas kelulusan ujian, semua sekolah meluluskan siswanya 100%, jadi walaupun siswa-siswanya tidak belajar mereka tetap lulus ujian, tetapi apakah hal itu baik? bagaimana dampaknya dengan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia apabila siswa-siswanya tidak mau belajar?

6. MASALAH DALAM UJIAN NASIONAL SETIAP TAHUN

Selain masalah kebocoran soal ujian , juga ada beberapa permasalahan pokok yang selalu dihadapi dalam pelaksanaan Ujian Nasional dari tahun ke tahunnya yaitu: **Keterlambatan percetakan naskah soal** Setiap tahun dalam pelaksanaan Ujian Nasional selalu ada saja masalah tentang percetakan bahan-bahan Ujian Nasional. Masalahnya adalah setiap tahun harus dicetak bahan-bahan Ujian Nasional sebanyak sekitar jumlah peserta Ujian Nasional jenjang SMP dan sederajat sekitar 3.760.000 peserta dan jumlah peserta Ujian Nasional jenjang SMA dan sederajat sekitar 2.800.000 peserta. Dengan jumlah total peserta yang demikian banyak sekitar 6.500.000 peserta, harus dicetak bahan-bahan Ujian Nasional dan juga harus didistribusikan ke seluruh daerah termasuk daerah-daerah yang terpencil di Indonesia. ¹⁰⁷

Keterlambatan percetakan naskah soal Ujian Nasional pada tahun 2012/2013 yang disebabkan oleh salah satu perusahaan percetakan pemenang tender sehingga menyebabkan pengunduran jadwal pelaksanaan Ujian Nasional di 11 propinsi di Indonesia. Dengan adanya keterlambatan pencetakan naskah soal ini menyebabkan berbagai masalah baru muncul. Walaupun tahun 2013/2014 tidak terjadi keterlambatan percetakan naskah, tetapi masalah keamanan terjadi ada laporan pengaduan kebocoran soal karena terlalu cepatnya naskah soal ujian yang dikirim ke daerah-daerah menjadi suatu masalah baru. **Kekurangan/kerusakan naskah soal** Setiap tahun diadakan Ujian Nasional kekurangan/kerusakan naskah soal selalu saja terjadi. Walaupun setiap tahun perusahaan percetakan pemenangnya tidak sama, tetapi tetap saja terjadi kekurangan/kerusakan naskah soal. Jadi walaupun perusahaan percetakannya berbeda-beda, kesalahan pada manusianya di percetakan tetap saja terjadi. Karena memang tidak semua proses di percetakan bisa dilakukan oleh mesin. Walaupun memang data peserta yang mengikuti Ujian Nasional yang valid dari sekolah-sekolah di lapangan setiap tahun juga sangat sulit didapatkan sebelum naskah soal ujian dicetak. Akhirnya solusi di lapangan apabila terjadi masalah kekurangan/kerusakan naskah soal pada hari H nya, maka petugas lapangan berusaha mencari naskah soal yang sama dari kelas lain di sekolah itu sendiri, apabila tidak ditemukan dicarikan dari sekolah lain di dalam rayon tersebut, dan apabila naskah soalnya itu jumlahnya kurang, maka petugas lapangan disaksikan petugas kepolisian memfoto copy naskah tersebut dan dibuatkan berita acaranya. **Kekurangan/kerusakan Lembar**

Jawaban Komputer (LJK)

Sudah dua tahun ini dalam pelaksanaan Ujian Nasional menggunakan 20 paket tes yang paralel yang berbeda dalam satu kelas. Dan Lembar Jawaban Komputer (LJK)nya juga menjadi satu dengan soalnya, yang diberi barcode. Pada hari H nya, apabila ada LJK yang rusak, maka petugas lapangan harus mencarikan dan mengganti LJK yang rusak dengan LJK baru sekaligus menyatu dengan soalnya. Apabila ada peserta ujian ditengah-tengah mengerjakan soalnya LJKnya rusak karena dihapus, maka petugas lapangan harus mencarikan LJK baru menyatu dengan soal yang baru. Dan nanti pada akhir waktu pelaksanaan ujian, peserta ujian harus mengumpulkan dua pasang LJK dan soalnya (kedua-duanya), yang pertama dia kerjakan dan yang kedua setelah diberikan yang baru oleh petugas. Maksud diberikan barcode pada LJK dan naskah soal adalah agar apabila naskah soalnya 108

bocor, kita tidak dapat mengetahui naskah soal yang bocor itu naskah soal berapa, karena di dalam kelas ada 20 paket naskah soal yang berbeda. Rupanya strategi ini juga tidak efektif apabila yang bocor itu semua 20 paket naskah soal. **Tertukarnya naskah soal** Setiap tahun diadakan Ujian Nasional juga selalu ada masalah tertukarnya naskah soal. Setiap tahun juga perusahaan percetakan pemenangnya juga berbeda, tetapi tetap saja ada masalah tertukarnya naskah soal. Karena memang pekerjaan memasukan naskah soal ke dalam amplop masih dilakukan oleh manusia, jadi human error kemungkinan sekali dapat terjadi. Sebenarnya beberapa kemungkinan bisa terjadinya tertukarnya naskah soal, bisa terjadi percetakan salah mengirim naskah soal mata pelajaran tertentu ke kabupaten tertentu, sedangkan kabupaten tersebut tidak memerlukan mata pelajaran tersebut tetapi memerlukan mata pelajaran yang lain, bisa juga terjadi dalam satu amplop isi mata pelajaran di dalam amplopnya tidak sama dengan mata pelajaran yang tertulis di luar amplopnya, karena amplop disegel dan baru dapat dibuka di depan kelas pada saat hari H nya, sehingga baru dapat diketahuinya ada masalah saat hari H nya . Solusi pada waktu pelaksanaan Ujian Nasional pada hari H nya, petugas lapangan seperti halnya kekurangan naskah soal ujian, juga harus menukar dengan naskah soal yang benar.

Kecurangan/kebocoran naskah soal Pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan *paper and pencil test* setiap tahun ada saja yang mengadakan tentang kebocoran naskah soal, walaupun tidak semua pengaduan tersebut benar. Untuk mengurangi masalah kebocoran naskah soal, maka telah dibuat dari tahun ke tahun mulai dari satu (1) paket naskah soal dalam satu ruang ujian, kemudian menjadi dua (2) paket naskah soal yang paralel, lalu menjadi lima (5) paket naskah soal yang paralel, dan akhirnya sekarang menjadi dua puluh (20) paket naskah soal yang paralel, artinya semua peserta ujian dalam satu ruang ujian mengerjakan paket soal yang berbeda, jadi artinya tidak bisa saling lihat melihat hasil pekerjaannya.

Dengan dua puluh (20) paket naskah soal yang paralel, apabila hanya sebagian paket soal saja yang bocor, kita masih tidak tahu paket-paket mana yang bocor dan masih ada paket-paket naskah soal yang tidak bocor. Tapi masalahnya ada kejadian kedua puluh (20) paket naskah soal ujian itu bisa bocor semua, dan peserta ujian juga bisa mengetahui paket-paket mana yang sudah dibuatkan kunci-kunci jawabannya. 109

Kunci-kunci jawaban untuk 20 paket tersebut sudah diketik kecil-kecil dan rapih dan sudah siap tinggal difotocopy. Kunci-kunci jawaban untuk semua 20 paket naskah soal tersebut sudah diketik kecil-kecil dan rapih diketemukan pada hari H pelaksanaan Ujian Nasional, jadi kemungkinan bocornya kunci jawaban tersebut terjadi pada saat terjadi di Percetakan. Karena di percetakan 20 paket naskah soal kemungkinan sudah bocor dan semua paket tersebut dibuatkan kuncinya, dan sempat diketik kecil-kecil kunci jawaban untuk setiap paket soalnya. Sumber-sumber kebocoran kunci-kunci jawaban naskah soal tersebut selain kemungkinan bisa terjadi di percetakan, bisa juga terjadi pada saat distribusi naskah soal. Pada saat distribusi naskah soal dari percetakan ke gudang-gudang penyimpanan di daerah-daerah. Kecurangan/ kebocoran naskah soal Ujian Nasional kemungkinan bisa juga terjadi di lingkungan sekolah atau di ruangan Ujian Nasional. Pada pelaksanaan Ujian Nasional hari H nya, pagi-pagi pada saat sebelum Ujian Nasional dilaksanakan, di lingkungan sekolah pada saat naskah soal ujian sudah sampai di sekolah, kemungkinan guru-guru di sekolah tersebut mengerjakan soal-soal Ujian Nasional dan kunci jawabannya dibagikan kepada peserta ujian. Kemungkinan terakhir sumber kecurangan/ kebocoran naskah soal adalah ada di di ruang ujian. Sebenarnya apabila di ruang ujian, dua orang pengawas ruang ujian bekerja dengan jujur dan baik, tidak akan terjadi peserta didik menggunakan bocoran-bocoran soal ujian. Karena menurut Prosedur Operasional Standar peserta didik selama mengerjakan soal-soal Ujian Nasional seharusnya tidak boleh menggunakan alat komunikasi (Hp), dan semua kertas-kertas (termasuk catatan bocoran kunci jawaban). Tapi ada informasi bahwa dua orang pengawas ruang ujian itu juga kemungkinan sudah dapat instruksi dari atasan di wilayahnya untuk saling membantu peserta didik dalam mengerjakan soal-soal ujian dengan cara apapun, jadi mereka semua di daerah itu sudah sepakat untuk saling membantu peserta didik mengerjakan soal-soal walaupun mereka mengawas bukan di sekolahnya sendiri tetapi masih dalam batas wilayah yang sama, hal ini terjadi karena adanya sistem otonomi daerah. **Masalah penskoran** Karena banyaknya peserta Ujian Nasional sekitar 6.500.000 orang di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia, penskorannya pun memakan 110

waktu yang cukup lama. Walaupun dalam Ujian Nasional soal-soal yang digunakan semuanya dalam bentuk Pilihan Ganda. Sebelum penskoran, hasil jawaban dari para peserta ujian harus dipindai (*scan*) dengan mesin pemindai di daerah, baru kemudian dikirim ke pusat untuk di skor. Setiap tahun ada saja masalah dari daerah dalam pemindaian Lembar Jawaban Komputer (LJK) sehingga terlambat mengirimkan hasil pemindaian ke pusat. Dalam pemindaian LJK sering terjadi LJK peserta ujian sukar untuk dipindai, bisa karena kertas LJKnya rusak, atau bahkan LJK peserta ujian sering juga keterlinsut atau tertinggal. Sedangkan dalam Ujian Nasional seluruh peserta ujian harus diumumkan hasilnya, jadi tidak boleh ada satu LJK pun yang keterlinsut atau tertinggal, kalau itu terjadi harus terus dicari sampai dapat, inilah salah satu yang menyebabkan pengiriman hasil pemindaian ke pusat terlambat.

7. ALTERNATIF SOLUSI DAN USULAN UNTUK UJIAN NASIONAL

PADA TAHUN 2015 Ada beberapa usulan atau saran dalam jangka pendek . Untuk jangka pendek, tahun depan, tahun pelajaran 2014/2015 disarankan secara bertahap pelaksanaan Ujian Nasional, sudah mulai menggunakan komputer (*Computerized Based Test*) hanya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap saja. Semua permasalahan pelaksanaan Ujian Nasional setiap tahunnya terjadi karena Ujian Nasional kita masih menggunakan *paper and pencil test*. Semua permasalahan yang dikemukakan di atas sebenarnya akar masalahnya umumnya terdapat di percetakan karena Ujian Nasional masih menggunakan *paper and pencil test* . Masalah-masalah tentang keterlambatan pencetakan naskah soal, demikian pula halnya dengan masalah-masalah kekurangan/kerusakan naskah soal, kekurangan/kerusakan Lembar Jawaban Komputer (LJK), tertukarnya naskah soal, dan masalah kebocoran naskah soal juga tidak akan terjadi lagi kalau Ujian Nasional sudah menggunakan komputer.

Masalah penskoran Ujian Nasional kalau kita menggunakan komputer (*Computerized Based Test*) tidak ada lagi. Tidak perlu ada lagi pemindaian yang menyebabkan masalah hasil penskorannya terlambat. Bahkan kalau Ujian Nasional menggunakan komputer (*Computerized Based Test*), begitu peserta didik selesai mengerjakan tes, sebenarnya hasil penskorannya sudah dapat diketahui, tetapi bisa saja diprogram, kalau diperlukan, hasilnya itu 111

belum bisa dilihat. Karena hasil ujiannya bisa sangat cepat didapatkan kalau menggunakan komputer (*Computerized Based Test*), maka ada kemungkinan kebijakan baru untuk bisa mengulang apabila peserta ujian belum lulus ujian. Sebelum diadakan pelaksanaan Ujian Nasional, sekolah-sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan Ujian Nasional dengan menggunakan komputer, bisa saja sekolah-sekolah tersebut diberikan program (*software*) Ujian Nasionalnya agar siswa-siswanya bisa lebih biasa berlatih menggunakan program (*software*) Ujian Nasional tersebut. Kalau ada kesalahan dalam naskah soal, seperti juga yang terjadi pada tahun ini (tahun 2014) karena ada nama tokoh Calon Presiden dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga soal tersebut harus diganti dibuat lembaran baru dan disisipkan/ditambahkan pada naskah soal aslinya. Harus mengirim lagi petugas pusat ke daerah-daerah atau ke percetakan. Apabila Ujian Nasional sudah menggunakan komputer (*Computerized Based Test*), mudah sekali untuk merubah/mengganti soal apabila ada kesalahan di dalam komputer, tidak memakan biaya, tenaga, dan waktu. Untuk mengantisipasi kebocoran soal sekarang sudah digunakan dua puluh (20) paket soal yang parallel di dalam satu ruangan Ujian Nasional. Artinya di dalam ruangan ujian peserta ujian mengerjakan paket soal parallel yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa saling bekerja sama. Apabila Ujian Nasional sudah menggunakan komputer (*Computerized Based Test*), paket soal yang akan digunakan oleh peserta didik kemungkinanannya bisa lebih dari dua puluh (20) paket naskah soal yang parallel.

8. USULAN UJIAN NASIONAL (UN) UNTUK MASA YANG AKAN DATANG

Dalam pelaksanaan Ujian Nasional sekarang masih melibatkan banyak sekali pihak-pihak di pusat maupun di daerah. Sampai pada pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat ruang ujian, petugas yang mengawasi di ruang ujian adalah guru-guru di sekolah. Sedangkan kita semua tahu bahwa guru-guru di sekolah adalah pihak internal yang mempunyai Program Belajar Mengajar di kelas dan Ujian Nasional adalah evaluasi external. Apakah mungkin bisa objektif guru-guru sebagai pihak internal ditugaskan mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional di ruang ujian? Apakah tidak ada ***conflict of interest***? 112

Apalagi sekarang di daerah-daerah di Indonesia sudah menggunakan system Otonomi Daerah. Sering terjadi Bupati Kepala Daerahnya menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikannya dan Kepala Sekolah di wilayahnya, agar mensukseskan Ujian Nasional. Maka pembantu-pembantunya di lapangan bisa menginterpretasikan instruksi tersebut bahwa mereka diperintahkan untuk mensukseskan hasil dari Ujian Nasional dengan cara apapun juga. Bahkan ada juga terjadi kalau hasil dari Ujian Nasionalnya di wilayahnya jelek, Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolahnya dimutasikan atau dicopot. Sehingga Kepala Dinas atau Kepala Sekolahnya juga menginstruksikan kepada guru-gurunya agar siswa-siswanya bisa mendapatkan hasil Ujian Nasional yang baik dengan cara apapun juga. Karena itu sering kita dengar di sekolah-sekolah ada “*tim sukses*”, yang mengusahakan agar siswa-siswanya mendapat nilai Ujian Nasional yang baik. Bahkan “*tim sukses*” tersebut yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran mengerjakan soal-soal, ujian dan kunci jawabannya diberikan kepada siswa-siswanya saat Ujian Nasional. Memang saat ini Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP), menurut undang-undang sebagai penanggung jawab penyelenggara Ujian Nasional, tidak ada pilihan lagi untuk menugaskan guru-guru sebagai pengawas ruang ujian, karena tidak ada lagi petugas di daerah-daerah yang bisa ditugasi mengawasi ruang ujian. Walaupun Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP), juga sudah menugaskan Perguruan Tinggi untuk mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional, karena memang bukan tupoksinya juga jumlah ruang Ujian Nasional seluruh Indonesia begitu banyak, maka tidak cukup dosen untuk mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional di ruang-ruang Ujian Nasional di seluruh Indonesia. Karena itu untuk ke depannya, pelaksanaan Ujian Nasional diusulkan dilaksanakan oleh suatu institusi yang independen, dan professional dalam bidang penilaian dan mempunyai cabang di daerah-daerah. Sehingga pengawasan Ujian Nasional di ruang ujian bisa dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan oleh institusi tersebut. Untuk tahun depan pelaksanaan Ujian Nasional diusulkan masih menggunakan *Computerized Based Test (C.B.T)*, tetapi untuk masa-masa yang akan datang sudah menggunakan *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)*. Diasumsikan bahwa untuk masa-masa yang akan datang perbendaharaan soal-soal di dalam Bank Soal di Puspendik juga sudah banyak dan juga jaringan infrastruktur kita juga sudah sangat siap, sehingga penerapan penggunaan *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)* dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia tidak ada kendala lagi. 113

Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi waktu pelaksanaan Ujian Nasional dengan menggunakan *paper and pencil test* juga sama bisa diatasi atau dihilangkan apabila kita menggunakan *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)* , bahkan dengan menggunakan *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)* pengukurannya bisa lebih tepat dan akurat dibandingkan kalau hanya menggunakan *Computerized Based Test (C.B.T)* . Dengan *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)*, setiap peserta ujian juga menghadapi satu komputer, setiap peserta ujian bisa mendapatkan soal-soal yang berbeda dengan peserta ujian lainnya di dalam satu ruangan ujian. Jumlah soal keseluruhan yang dikerjakan oleh setiap peserta ujian juga bisa berbeda banyaknya. Jadi soal-soal yang diberikan komputer sesuai dengan kemampuan setiap peserta ujian yang dites. Misalnya peserta ujian A menjawab salah soal nomor 1, komputer otomatis memberikan soal yang lebih mudah kepada A, misalnya A menjawab soal nomor 2 masih salah, otomatis komputer memberikan soal yang lebih mudah lagi, misalnya A menjawab soal nomor 3 masih salah, otomatis komputer memberikan soal nomor 4 yang lebih mudah lagi, misalkan soal nomor 4, A menjawab benar, maka otomatis komputer memberikan soal yang lebih sukar, begitu seterusnya, dan komputer akan berhenti sampai stabil komputer mengetahui kemampuan peserta ujian tersebut. Tentunya pola menjawab peserta-peserta ujian lainnya tidak akan sama dengan pola menjawab peserta ujian A karena sangat tergantung dari para kemampuan peserta ujian itu sendiri. Jadi pada *Computerized Adaptive Testing (C.A.T)*, setiap peserta ujian diberikan soal-soal yang tergantung dari kemampuannya masing-masing. Komputer akan berhenti beriterasi untuk memberikan soal kepada peserta ujian, apabila komputer sudah mendapatkan skor kemampuan peserta ujian tersebut. Selain sesama peserta ujian tidak mungkin bekerja sama atau nyontek, karena mereka mendapatkan soal-soal yang berbeda, hasil pengukurannya pun juga lebih akurat dibanding *C.B.T* dan *paper and pencil test*. . 114

DAFTAR PUSTAKA *Laporan Pelaksanaan dan Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014*, 2014, Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendukbud, (belum diterbitkan) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan*, Jakarta, 2006 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan*, Jakarta 2014 *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional*, Jakarta 2013. *Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 00 2 2/ P/BSNP/XI/2013 Tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014*, Jakarta, 2013 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2006.